



Available online at
<https://jurnal.unpad.ac.id/share/issue/archive>



Research Paper

Dynamic Governance dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Sentra UMKM Lepet Kabupaten Jombang

Nieke Rudyanty Winanda¹, Nanditya Putri Destyananda², Zaenal Arifin³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Darul 'Ulum

*Correspondence author: nieke.rudyanty@gmail.com

Abstrak

Masuknya budaya asing ke Indonesia dewasa ini semakin mengancam keberadaan budaya dan tradisi asli Indonesia. Hal ini juga terjadi pada makanan tradisional dimana masyarakat semakin menggemari makanan-makanan asing dan melupakan keberadaan makanan tradisional asli Indonesia. Lepet yang merupakan makanan asli Indonesia khususnya Jawa sudah mulai banyak dilupakan oleh masyarakat. Namun begitu, di kabupaten Jombang terdapat sentra UMKM lepet tepatnya di desa Ngumpul. Di daerah tersebut, lepet bukan hanya sekadar tradisi dan budaya lokal namun juga sebagai penopang ekonomi masyarakat setempat. Adanya sentra UMKM lepet tersebut selain untuk melestarikan makanan tradisional juga sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Kajian ini akan dianalisis menggunakan teori dynamic governance yang terdiri dari dua elemen kunci yakni *culture* dan *capabilities*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan model pengumpulan data menggunakan wawancara dengan para pihak yang berhubungan dengan penelitian, observasi yang dilakukan secara partisipatif dan nonpartisipatif serta dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *dynamic governance* telah diimplementasikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sentra UMKM lepet kabupaten Jombang.

kata kunci: *dynamic governance*; pemberdayaan ekonomi; UMKM; lepet.

Abstract

ARTICLE INFO Received: 10 25, 24 Received in revised form: 05 30, 26 Accepted: 08 01, 26 doi: https://doi.org/10.24198/share.v16i1.58652	SHARE SOCIAL WORK JOURNAL Published by Department of Social Welfare, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, Indonesia	Address: Department of Social Welfare, Building B FISIP-UNPAD, Bandung Sumedang km 21 Highway Jatinangor, Sumedang Phone/Fax (022) 7796974, 7796416
 This is an open access article under the CC BY-SA license © Winanda, Destyananda & Arifin (2026)	Please cite this article in APA Style as: Winanda, N. R., Destyananda, N. P., & Arifin, Z. (2026). <i>Dynamic governance dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada sentra UMKM Lepet Kabupaten Jombang. SHARE Social Work Journal</i> , 16(1), 27–35. https://doi.org/10.24198/share.v16i1.58652	

The influx of foreign culture into Indonesia today increasingly threatens the existence of native Indonesian culture and traditions. This also happens to traditional food where people increasingly like foreign food and forget about the existence of authentic Indonesian traditional food. Lepet, which is a native food from Indonesia, especially Java, has begun to be forgotten by many people. However, in Jombang district there is a Lepet MSME center in Ngumpul village. In this area, lepet is not only a local tradition and culture but also a support for the local community's economy. The existence of this Lepet MSME center not only serves to preserve traditional food but also to empower the local community's economy. This study will be analyzed using dynamic governance theory which consists of two key elements, namely culture and capabilities. This research uses descriptive qualitative methods. The data used are primary data and secondary data with a data collection model using interviews with parties related to the research, observation conducted in a participatory and non participatory manner, and documentation. The data analysis used is the Miles and Huberman model. The results of this research show that dynamic governance has been implemented in community economic empowerment in the UMKM lepet center of Jombang district.

Keywords: *dynamic governance; economic empowerment; MSME; lepet*

1. Pendahuluan

Dewasa ini gempuran budaya asing sangat gencar masuk Indonesia. Sebut saja budaya K-pop yang menjangkiti kalangan muda negeri ini. Bukan sekadar drama, film ataupun musik semata, tapi juga mengarah pada gaya fashion bahkan hingga makanan. Hal tersebut tentunya membuat budaya dan tradisi-tradisi lokal mulai bergeser perlahan-lahan. Para kaum muda lebih menyukai budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negeri (Dewi Puspaningrum et al., 2024). Gencarnya budaya-budaya asing yang masuk Indonesia mau tidak mau membuat para pegiat budaya dan pemerintah bekerja keras untuk mempertahankan eksistensi budaya dan tradisi lokal di negeri sendiri. Pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memperkenalkan budaya asli Indonesia kepada masyarakat khususnya para kaum muda. Hal ini perlu dilakukan karena anak-anak muda zaman sekarang lebih mengenal samyang daripada nasi krawu.

Gempuran makanan asing membuat masyarakat seakan lupa akan kelezatan kuliner asli Indonesia. Sate madura, rawon, rendang hingga coto Makassar tidak kalah lezat jika dibandingkan dengan *hamburger* dan *pizza*. Dari pulau Jawa ada makanan khas yang biasanya disajikan ketika lebaran yakni lepet. Dewasa ini makanan tersebut mulai berkurang penikmatnya khususnya di kalangan anak muda. Lepet merupakan makanan khas lebaran ikonik di pulau Jawa selain ketupat. Lepet berasal dari kata 'silep' yang memiliki makna kubur atau simpan dan 'rapet' yang berarti rapat sehingga makna utuhnya menjadi dikubur rapat-rapat yang merujuk pada kesalahan (Sitoresmi, 2022). Artinya, lepet ini bermakna saling memaafkan dan mengubur kesalahan yang identik dengan budaya lebaran di Indonesia yakni saling memaafkan.

Di kabupaten Jombang terdapat sentra UMKM lepet, tepatnya di desa Ngumpul kecamatan Jogoroto. Di salah satu dusun di desa tersebut yakni dusun Ngembah, tujuh puluh lima persen dari 1.040 warganya mempunyai aktivitas sebagai pembuat lepet (desakita.co, 2024). Hal ini tentu saja merupakan salah satu upaya untuk melestarikan makanan tradisional. Dalam hal ini tentunya diperlukan dukungan dari pemerintah agar makanan tradisional tersebut dapat tetap memiliki tempat di negeri sendiri selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-undang ini menjadi upaya pemerintah untuk memfasilitasi dan mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Begitupun para pelaku UMKM di desa Ngumpul kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang yang menjadi sentra pembuat lepet. Upaya pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui UMKM merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Hal ini karena UMKM merupakan salah satu pondasi perekonomian nasional yang berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah, UMKM berkontribusi sebesar 99% dari seluruh

unit usaha dimana kontribusinya terhadap PDB sebesar 60,5% serta penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% (Ariyanti, 2023). Menurut Scheyvens, 1999 menyebut bahwa keberdayaan secara ekonomi ditandai dengan adanya keuntungan ekonomi yang berkesinambungan selain itu terdapat kenaikan keuangan yang diukur secara kuantitas (Rahmawati & Darwis, 2024). Melihat fakta tersebut agaknya tidak berlebihan jika UMKM disebut salah satu pilar perekonomian di negeri ini.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitasnya sehingga menjadikan mereka lebih berdaya (Setiawati et al., 2024). Peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM sangatlah besar. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemberdayaan UMKM, pemerintah perlu membangun sinergi dengan berbagai pihak. *United Nations Educational and Cultural Organization* (UNESCO), 2021 menyebut bahwa tata kelola merupakan suatu hal yang merujuk pada struktur dan proses yang didesain dalam rangka memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, suspensi hukum, stabilitas, kesetaraan dan inklusivitas, pemberdayaan serta partisipasi berbasis luas.

Selain itu, tata kelola juga merepresentasikan norma, nilai dan aturan main yang mana melalui hal tersebut, urusan publik dikelola secara transparan, partisipatif, inklusif dan responsif (Sabarisman & Suradi, 2022). Saat ini, tata kelola pemerintahan yang baik tidak saja hanya meliputi transparan, akuntabel dan partisipasi seperti dalam konsep *good governance*. Saat ini paradigma telah bergeser menjadi *dynamic governance* yakni pemerintahan yang dinamis, adaptif serta responsif. Neo & Chen (2007) *Dynamic governance* merupakan budaya pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Martoyo & Sihalo, 2021)

Paradigma *dynamic governance* menuntut pemerintah untuk memiliki kapabilitas berpikir jauh ke depan (*thinking ahead*), berpikir kembali (*thinking again*) serta berpikir terbuka (*thinking accross*) (Mazidah et al., 2019). Artinya pemerintah harus lebih dinamis dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangannya. Konsep ini sangat sesuai diimplementasikan dalam segala aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian terdahulu menunjukkan masih belum banyak yang menyebut tentang implementasi *dynamic governance* dalam pemberdayaan masyarakat. (Martoyo & Sihalo, 2021) dalam penelitiannya menyebut *dynamic governance* dan hubungannya dengan *digital government*. Sedangkan Putri (2023) menghubungkan *dynamic governance* dengan program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Adapun (Firdaus & Cahyani, 2023) menyebutkan pemberdayaan masyarakat yang dianalisis menggunakan teori pentahelix.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana *dynamic governace* diimplementasikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sentra UMKM lepet kabupaten Jombang. Dalam hal ini perlu untuk dilakukan analisis terkait kiprah pemerintah dalam mengimplementasikan *dynamic governance* di lingkungan tersebut. Ini menjadi penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data yang digunakan yakni data primer yang meliputi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain, kepala desa, perangkat desa, para pelaku UMKM lepet serta masyarakat khususnya konsumen lepet.

Selain itu dilakukan pula observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yakni implementasi *dynamic governance* di sentra UMKM lepet kabupaten Jombang. Observasi yang dilakukan berupa observasi partisipatif maupun nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif, peneliti turut terlibat dalam proses produksi lepet, sedangkan observasi partisipatif dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap permasalahan terkait UMKM lepet. Di samping itu, juga dilakukan dokumentasi berupa pencatatan-pencatatan hasil temuan di lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Hubberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan atau *conclusion drawing* (Miles, 2009).

3. Hasil and Diskusi

Lepet merupakan makanan tradisional Indonesia yang wajib dilestarikan di tengah gempuran makanan-makanan asing yang masuk ke dalam negeri dan digemari oleh masyarakat. Diperlukan upaya dan komitmen dari berbagai pihak untuk melestarikan salah satu kekayaan budaya asli Indonesia tersebut. Upaya dan komitmen dari berbagai pihak tersebut harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Salah satu wujud melestarikan makanan tradisional lepet tersebut adalah dengan menyajikannya di berbagai kesempatan. Selama ini lepet dikenal sebagai pendamping ketupat yang menjadi makanan khas di momen lebaran. Dengan lebih sering menyajikannya di berbagai kesempatan, diharapkan lepet akan lebih banyak dikenal dan disukai masyarakat terutama kalangan anak-anak muda.

Di kabupaten Jombang terdapat sentra UMKM lepet tepatnya di desa Ngumpul kecamatan Jogoroto. Para pelaku UMKM pembuat lepet ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat eksis mengembangkan usahanya yang sekaligus menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat. Dukungan dari berbagai pihak tersebut, terutama pemerintah setempat agar mereka tetap bertahan dan mengembangkan usahanya.

Sentra UMKM Lepet di Kabupaten Jombang

Di kabupaten Jombang yang memiliki *tagline* santri yakni santun, tertib, religius dan inovatif memiliki sebuah desa yang menjadi sentra UMKM dengan produk unggulan lepet. Sentra UMKM tersebut terletak di desa Ngumpul kecamatan Jogoroto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang tahun 2023, di desa Ngumpul terdapat 250 unit UMKM. UMKM tersebut tersebar dalam berbagai bidang usaha antara lain kuliner, kerajinan maupun jasa. Tentu saja mayoritas UMKM tersebut bergerak di bidang pembuatan lepet.

Lepet bukan hanya sumber penghasilan bagi masyarakat desa Ngumpul. Lepet sudah menjadi bagian dari budaya desa Ngumpul. Usaha pembuatan lepet di desa Ngumpul telah dimulai sejak sekitar tahun 1980an dan berlanjut hingga sekarang. Awalnya lepet hanya diproduksi ketika momen-momen tertentu saja, misalnya saat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha atau hari-hari besar lainnya. Saat ini produksi lepet sudah dilakukan hampir setiap hari.

Selain sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat desa Ngumpul, menurut Kepala desa setempat, lepet juga merupakan potensi desa yang harus terus dikembangkan. Pengembangan UMKM lepet ini tidak saja sekadar melestarikan makanan tradisional namun juga sebagai penopang ekonomi masyarakat desa setempat. Adanya sentra UMKM lepet yang terus berkembang, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

Culture masyarakat desa Ngumpul yang masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat membantu dalam pengembangan sentra UMKM di desa tersebut. Hal ini dapat tercermin dari adanya upaya saling membantu dalam proses pembuatan lepet yang dilakukan oleh warga. Terlepas dari semangat kompetisi yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di desa tersebut, ada semangat saling membantu dalam menjalankan usaha. Bantuan tersebut dapat berupa saling berbagi informasi, saling meminjam alat-alat produksi hingga kolaborasi dalam pemasaran produk.

Dalam proses pengembangan UMKM lepet di desa Ngumpul, berbagai fasilitas pendukung telah dimiliki oleh desa tersebut. Fasilitas-fasilitas tersebut antar lain jalan desa yang sudah beraspal yang akan

memudahkan distribusi produk dan bahan baku keluar masuk desa; listrik dan air bersih yang bisa diakses dengan mudah 24 jam dalam sehari; serta jaringan internet yang memungkinkan untuk mengembangkan pemasaran digital. Di samping itu, ada pula tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM lepet di desa Ngumpul. Tantangan-tantangan tersebut antara lain: terbatasnya modal, belum adanya standarisasi produk, serta jangkauan pemasaran yang masih terbatas karena produk yang dihasilkan kurang bisa bertahan lama.

Jumlah pelaku UMKM lepet di desa Ngumpul, Kabupaten Jombang adalah sekitar 125 unit. Kondisi dari tiap UMKM lepet yang ada di Desa Ngumpul sangat beragam, baik dari skala usaha, pendapatan per bulan, lama usaha yang dijalankan, kapasitas produksi, sampai dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Di mana hal tersebut digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Kondisi Usaha Lepet di Desa Ngumpul

Kategori	Sub-Kategori	Jumlah	Prosentase
Skala Usaha	Mikro	95	76%
	Kecil	30	24%
Omset Bulanan	< Rp 2 juta	30	24%
	Rp 2 juta - Rp 5 juta	48	38.4%
	Rp 5 juta - Rp 10 juta	32	25.6%
	Rp 10 juta - Rp 15 juta	12	9.6%
	> Rp 15 juta	3	2.4%
Lama Usaha	< 1 tahun	15	12%
	1 - 3 tahun	20	16%
	3 - 5 tahun	45	36%
	6 - 10 tahun	35	28%
	> 10 tahun	10	8%
Kapasitas Produksi	< 100 porsi/hari	25	20%
	100 - 500 porsi/hari	45	36%
	500 - 1000 porsi/hari	40	32%
	> 1000 porsi/hari	15	12%
Tenaga Kerja	1 orang	40	32%
	2 - 3 orang	55	44%
	4 - 5 orang	20	16%
	> 5 orang	10	8%

Sumber: data desa Ngumpul, 2024

Jika dilihat dari tabel tersebut, agaknya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa UMKM lepet merupakan potensi desa yang sangat layak untuk dikembangkan.

Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pemerintah dituntut untuk selalu cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat senantiasa menuntut pemerintahan untuk adaptif dan dinamis dalam menangani setiap persoalan yang terjadi. Pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dalam setiap kondisi yang terjadi di masyarakat. Penyesuaian diri tersebut harus dilakukan untuk memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konsep *good governance* terdapat beberapa prinsip dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsivitas (*responsiveness*), keadilan

(*fairness*), efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*), partisipasi (*participation*) (Rohman & Santrian Hanafi, 2019). Jika prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan maka tata kelola pemerintahan yang baik bukan mustahil untuk diwujudkan.

Namun paradigma *good governance* telah bergeser menuju *dynamic governance*. Jika dalam *good governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, dalam *dynamic governance* dapat berarti tata kelola yang bersih, efektif dan efisien (Putri & Putri, 2023). Kedua paradigma tersebut sebenarnya memiliki pengertian dan tujuan yang serupa yakni menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Neo & Chen, (2007) menyebut dua elemen kunci dalam *dynamic governance*. Dua elemen tersebut adalah *culture* dan *capabilities* (Rahmatunnisa, 2019).

Dalam hal ini, *dynamic governance* merupakan budaya pemerintahan yang adaptif dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat, yang mana ditunjukkan dengan tiga indikator kapabilitas (Martoyo & Sihalo, 2021). Elemen *culture* dapat dibagi menjadi tiga belas turunan antara lain, *integrity, incuroptibility, meritocracy, market, pragmatism, multi-racialism, state-activism, long term, relevance, growth, stability, prudence* dan *self-reliance* (Yanuar et al., 2023). Sedangkan elemen *capabilities* terdiri dari tiga poin yakni *thinking ahead, thinking again, thinking accross* (Sari et al., 2023).

Dynamic Governance dalam Pengembangan Sentra UMKM Lepet Kabupaten Jombang

Dalam penelitian ini analisis implementasi *dynamic governance* pada elemen *culture* akan difokuskan pada tujuh point. Ketujuh point tersebut adalah *state activism, long term, relevance, growth, prudence, stability*, serta *self reliance*. Sedangkan dalam elemen *capabilities*, ketiga fokus turunan yakni *thinking ahead, thinking again* serta *thinking accross* akan digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Pemilihan ketujuh elemen dari tiga belas aspek ini didasarkan atas relevansi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM lepet di desa Ngumpul.

Pada elemen *culture* yang pertama yakni *state activism*. Dalam aspek ini diperlukan adanya peran pemerintah dalam aktivitas masyarakatnya. Dalam hal ini diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah dalam pengembangan UMKM lepet. Pengembangan UMKM lepet ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah khususnya pemerintah desa terlihat sangat jelas misalnya dalam pemberian pelatihan serta bantuan modal bagi para pelaku UMKM lepet di desa Ngumpul.

Dalam aspek *state activism* ini, pemerintah desa Ngumpul terlibat dalam pengembangan sentra UMKM lepet. Keterlibatan itu salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan serta pendampingan usaha. Pelatihan dan pendampingan usaha tersebut meliputi manajemen usaha, pemasaran dan teknologi. Selain pelatihan dan pendampingan usaha, ada juga bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah desa. Berbagai bantuan modal tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan hibah dan bantuan lainnya. Di samping kedua keterlibatan tersebut, pemerintah juga terlibat dalam pengembangan infrastruktur misalnya jalan, penyediaan listrik dan air bersih.

Pada aspek *long term*, yang menunjukkan adanya rencana serta tujuan jangka panjang pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa setempat menganggap lepet bukan sekadar budaya dan tradisi. Lepet merupakan aset dan potensi desa yang layak dikembangkan. Hal ini selain melestarikan tradisi dan budaya juga sebagai pilar ekonomi masyarakat. Apabila sentra UMKM lepet di desa Ngumpul dapat dikembangkan maka dapat menjadi pilar ekonomi masyarakat di desa tersebut. Sejalan dengan aspek *long term*, kepala Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Jombang juga menyebut bahwa lepet merupakan potensi desa yang layak dikembangkan dan patut didukung untuk pengembangannya.

Pemerintah harus selalu adaptif dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan aspek *relevance*. Aspek *relevance* sangat tepat dengan pengembangan UMKM. Saat ini pengembangan UMKM di Indonesia menjadi tren sedang hangat. UMKM telah berkontribusi dalam perekonomian di Indonesia. Sejalan dengan yang diungkap oleh Pj. Bupati Jombang bahwa produk-produk UMKM yang berkualitas telah berhasil menembus pasar lokal bahkan nasional, selain itu juga membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di Jombang (setda.jombangkab.go.id, 2024).

Aspek selanjutnya yaitu *growth*. Dalam aspek ini, menunjukkan adanya pertumbuhan dalam masyarakat. Secara umum pertumbuhan UMKM di Indonesia terus peningkatan bahkan berkontribusi terhadap PDB sebesar lebih dari 60%. Pengembangan UMKM lepet di desa Ngumpul terus berkembang, hal ini tidak lepas dari peran pemerintah desa setempat. Saat ini, UMKM lepet di desa tersebut tidak hanya melaksanakan operasional dalam hal pembuatan saja. Perkembangan ini sudah merambah ke sentra kuliner lontong lepet yang berkembang di desa tersebut.

Dalam aspek *prudence*, dituntut adanya kebijaksanaan dalam pemerintahan. Pemerintah desa setempat telah membuat kebijakan yang menguntungkan para pelaku UMKM lepet. Kepala desa Ngumpul memiliki visi untuk menjadikan desa Ngumpul sebagai desa mandiri berbasis UMKM. Dalam menjalankan visi tersebut, fokus utama pembangunan adalah pengembangan UMKM lontong lepet sebagai potensi ekonomi unggulan desa. Beberapa program unggulan dari pemerintah desa setempat antara lain, pembentukan sentra kuliner lontong lepet; dana desa yang dialokasikan untuk pelatihan dan pembinaan UMKM; serta menjalin kerjasama dengan BUMDes untuk memfasilitasi permodalan.

Pada aspek *stability*, yakni ditunjukkan dengan adanya stabilitas yang ada di masyarakat. *Stability*, dalam hal ini usaha lepet yang telah berlangsung lama di desa Ngumpul tetap bertahan dan terus berkembang. Kondisi yang stabil ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah desa setempat yang berkomitmen untuk terus melindungi dan mengembangkan usaha tersebut. Salah satu upaya dalam mengembangkan dan mempertahankan UMKM lepet di desa Ngumpul tersebut adalah dengan membuat Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan UMKM Desa yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam menjalankan dan pengembangan UMKM lepet.

Aspek terakhir yakni *self-reliance*. Dalam aspek ini diperlukan adanya kemandirian yang berkembang pada masyarakat. Pada aspek ini, kemandirian terlihat sangat jelas dalam penelitian ini, khususnya aspek ekonomi. Sentra UMKM lepet di desa Ngumpul tidak hanya memberikan kontribusi terutama ekonomi terhadap para pelakunya. Lebih dari itu, sentra UMKM lepet ini juga memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat. UMKM lepet ini telah banyak menyerap tenaga kerja serta memberikan pendapatan bagi warga setempat. Di samping itu, UMKM lepet ini juga berkontribusi dalam peningkatan citra desa Ngumpul sebagai desa penghasil lontong lepet.

Selain di analisis dari elemen *culture*, penelitian ini juga menggunakan elemen *capabilities* dalam menganalisis permasalahan. Dalam elemen *capabilities* terdapat tiga aspek yang akan digunakan. Ketiga aspek tersebut adalah *thinking ahead* yang berarti berpikir ke depan. *Thinking again* yang artinya berpikir lagi. Serta berpikir lintas batas atau *thinking accross*. Dalam aspek *thinking ahead*, pemerintah dituntut untuk berpikir ke depan serta melihat perubahan lingkungan. Sedangkan dalam *thinking again*, pemerintah dituntut untuk merefleksikan kembali apa yang sedang dikerjakan. Sementara itu dalam *thinking accross* pemerintah dituntut untuk belajar dari berbagai pihak.

Aspek *thinking ahead* dalam penegembangan sentra UMKM lepet di desa Ngumpul tercermin dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang cukup visioner. Hal ini dapat diketahui dari visi kepala desa yakni mengembangkan potensi ekonomi desa melalui pemberdayaan UMKM terutama lontong lepet. Selain itu fokus utama pembangunan desa adalah mengembangkan UMKM lontong lepet sebagai potensi unggulan desa.

Di samping menjadikan lontong lepet sebagai fokus utama visi kepala desa, dalam aspek *thinking ahead* ini dilakukan juga aksi nyata. Aksi nyata tersebut berupa promosi melalui festival yang diadakan setiap bulan Agustus. Hal ini dilakukan selain untuk memperkenalkan produk unggulan desa Ngumpul juga sebagai sarana promosi agar masyarakat lebih mengenal lepet yang diproduksi oleh UMKM lepet di desa tersebut. Selain itu, dalam beberapa acara besar di desa Ngumpul, lontong lepet selalu tampil sebagai ikon utama.

Pada aspek *thinking again* agaknya pemerintah setempat masih harus memutar otak dalam upaya pemasaran secara nasional. Kendati produk hasil sentra UMKM lepet desa Ngumpul telah menembus

pasar Jawa Timur terutama di kota-kota sekitar kabupaten Jombang, namun para pelaku UMKM lepet belum berani memasarkan produknya lebih luas. Hal ini disebabkan oleh daya tahan lepet yang berbahan dasar beras ketan dan kelapa yang tidak mampu bertahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Kenyataan ini diakui oleh para produsen lepet yang mengatakan bahwa mereka tidak mau menambahkan bahan-bahan kimia untuk pengawetan produknya. Dalam hal ini pemerintah desa setempat masih terus mendorong para pelaku UMKM lepet untuk terus berinovasi sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tentunya pemerintah desa setempat juga tidak terburu-buru dan perlu meninjau ulang perluasan pasar jika kondisi produk belum memungkinkan.

Aspek yang terakhir adalah *thinking accross*. Pada pengembangan UMKM lepet di desa Ngumpul terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Namun dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah desa setempat dan didukung oleh pihak-pihak yang terkait berani mengambil langkah untuk terus meningkatkan eksistensi lepet sebagai makanan tradisional. UMKM lepet di desa Ngumpul yang mayoritas usahanya berskala mikro telah mampu menembus pasar Jawa Timur khususnya kota-kota di sekitar kabupaten Jombang seperti Mojokerto dan Surabaya. Hal ini bukan tidak mungkin jika suatu hari nanti ditemukan inovasi untuk menambah daya tahan lepet hingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Inovasi inilah yang saat ini terus menjadi pemikiran para pelaku UMKM lepet di desa Ngumpul dan pemerintah desa setempat dalam rangka memperluas pasar.

4. Simpulan

Dalam pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM lepet di desa Ngumpul, kecamatan Jogoroto, kabupaten Jombang, *dynamic governance* telah diimplementasikan. Implementasi *dynamic governance* tersebut telah mencakup dua elemen kunci yakni *culture* dan *capabilities*. Kedua elemen tersebut memiliki beberapa aspek turunan yang juga telah diimplementasikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM lepet. Pada elemen *culture*, aspek turunan yang diimplementasikan meliputi *state activism*, *long term*, *relevance*, *growth*, *prudence*, *stability* serta *self-reliance*. Sementara pada aspek *capabilities*, ketiga aspek turunan yang ada di dalamnya yakni *thinking ahead*, *thinking again* serta *thinking accross* telah diimplementasikan.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan melalui penelitian ini antara lain kepada masyarakat, hendaknya lebih mencintai budaya sendiri terutama makanan tradisional sehingga produk asli yang merupakan tradisi Indonesia mampu bersaing di tengah gempurang makanan asing. Selain itu, bagi pelaku UMKM pembuatan lepet di desa Ngumpul kabupaten Jombang, hendaknya juga terus mengembangkan usahanya dengan melakukan berbagai inovasi sehingga produk yang dihasilkan bisa diterima pasar dengan baik. Di samping itu diperlukan pula dukungan pemerintah setempat agar UMKM pembuatan lepet dapat terus berkembang dan semakin diterima masyarakat.

5. Keterbatasan

Terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian yang terbatas hanya pada satu desa masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih luas bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, analisis teori dalam penelitian ini hanya menggunakan tujuh indikator dalam elemen *culture* pada elemen *dynamic governance*. Untuk itu peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan kajian-kajian serupa menjadi lebih sempurna.

References

- Ariyanti, L. (2023, June 27). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html>desakita.co. (2024, June 5).
- Dusun di Desa Ngumpul Jogoroto Jombang Ini Dikenal Sebagai Kampung Ketupat Lepet, Pengirimannya Tembus Luar Kota | Desa Kita. <https://desakita.co/potensi/5755/dusun-di-desa-ngumpul-jogoroto-jombang-ini-dikenal-sebagai-kampung-ketupat-lepet-pengirimannya-tembus-luar-kota/>
- Dewi Puspaningrum, S., Febrinda Wijaya Kusuma, A., Salma Durrotul Husna, S., Fitriyani, A., Sufiya Najwa,

- S., Bella Agritya, L., Novalinda, P., & Cahya Maulana Putri, I. (2024). Pemertahanan Nilai-nilai Budaya Jawa di Era Meluasnya Budaya Asin saat ini, Studi Kasus pada Gen Z dan Mahasiswa UNNES. *Jurnal KULTUR*, 3(2), 210–220. <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/kultur>
- Firdaus, N. M., & Cahyani, A. S. N. (2023). Model Penta Helix Dalam Pemberdayaan Desa Digital Di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. *Jurnal Comm-Edu*, 5492, 87–91. <http://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/article/view/17151%0Ahttp://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/article/viewFile/17151/4352>
- Hegarmanah, P., Jatinangor, K., Sumedang, K., & Barat, J. (2023). Penerapan Dynamic Governance terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022. 8(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3174>
- Martoyo, M., & Sihaloho, N. T. P. (2021). Elemen Sukses Penerapan Dynamic Governance di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3142>
- Mazidah, A. L., Astuti, F., Romdhoni, F., Nur, I., & Juana, T. (2019). ANALISIS DYNAMIC GOVERNANCE PADA PROGRAM LAYANAN LAYAD RAWAT DI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG ANALYSIS DYNAMIC GOVERNANCE ON THE LAYAD RAWAT PROGRAMME IN BANDUNG CITY HEALTH OFFICE. *Spirit Publik*, 14(2), 154–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sp.v14i2.39290>
- Miles, H. (2009). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. UI Press.
- Neo, B. S., & C. G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. WorldScientific.
- Putri, N. P. D. K., & Putri, C. A. W. (2023). Pengelolaan Program Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat di Kota Denpasar dalam Perspektif Dynamic Governance. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.2023.1-7>
- Rahmatunnisa, M. (2019). DIALEKTIKA KONSEP DYNAMIC GOVERNANCE. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.116>
- Rahmawati, A., & Darwis, R. S. (2024). Dampak Pengembangan Pariwisata Perdesaan terhadap Keberdayaan Perempuan. *Share : Social Work Journal*, 14(1), 14–25.
- Rohman, A., & Santrian Hanafi, Y. (2019). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. 2.
- Sabarisman, M., & Suradi, -. (2022). TATA KELOLA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus Pogram BPNT di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan). *Share : Social Work Journal*, 12(1), 66. <https://doi.org/10.24198/share.v12i1.38948>
- Sari, A. I., Rusli, Z., & Riau, U. (2023). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS (DYNAMIC GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal SARAQ OPAT*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i1.442>
- setda.jombangkab.go.id. (2024, August 15). Berita | setda | Jombang. <https://setda.jombangkab.go.id/berita/pj-bupati-jombang-memotivasi-umkm-menembus-skala-nasional-dan-internasional-8845>
- Setiawati, S., Dwiyono, Y., & Mustangin. (2024). PERAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT AKAN POTENSI WISATA DI DESA WISATA BABULU LAUT. *Share : Social Work Journal*, 13(2), 231–238. <https://doi.org/10.45814/share.v13i2.40213>
- Sitoresmi, A. R. (2022, May 8). *Filosofi Lepet yang Penuh Makna Tersirat, Sajian Khas Lebaran Mirip Ketupat* - Page 3 - Islami Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/islami/read/4956256/filosofi-lepet-yang-penuh-makna-tersirat-sajian-khas-lebaran-mirip-ketupat?page=3>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Yanuar, F., Kartini, D.S., Akbar, I. (2023). Penerapan Dynamic Governance terhadap Tata Kelola Permukiman Akibat Dampak Urbanisasi di Kota Depok Tahun 2022. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(3), 202-212 <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3174>.